

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Artikel

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan
Titiek Kartika Hendrastiti

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia
Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota
Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia
Aditya Perdana dan Delia Wildianti

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi
Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah
Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo

Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT
Anita Dhewy dan Bella Sandiata

Diterbitkan oleh:

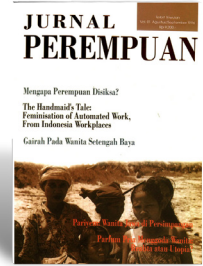
YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

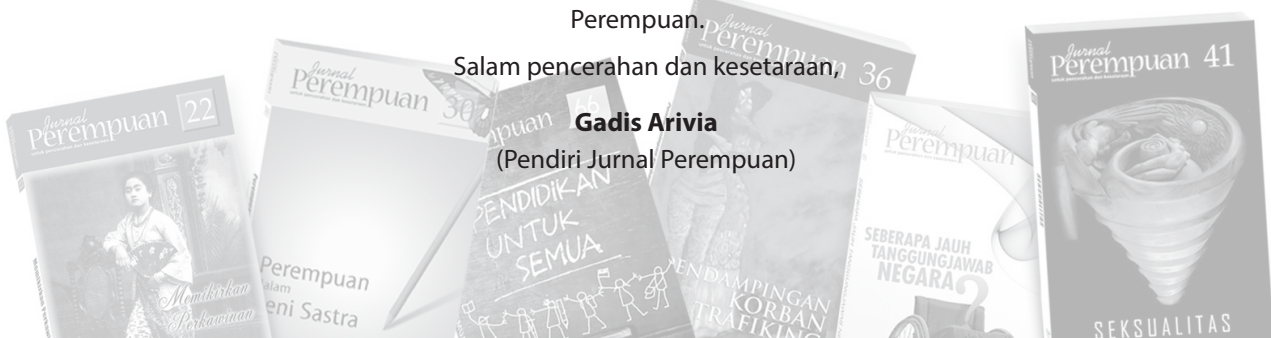
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigirow

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigirow (Pascasarjana Diplomasi,
Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

EDITOR TAMU

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)

Dr. Wening Udasromo (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian
Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender,
Universitas Indonesia)

Franscia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi,
Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat,
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.

Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Gery Andri Wibowo

Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Februari 2019

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia / *Indonesian Feminists' Discourse and Politics* iii

Artikel

- T tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan / *Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty* 1-12
Titiek Kartika Hendrastiti
- Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia / *Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia* 13-26
Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina
- Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota / *Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City* 27-42
Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi
- Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia / *Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia* 43-52
Aditya Perdana dan Delia Wildianti
- Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi / *Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces*..... 53-65
Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata
- Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah / *Women's Role in Central Java Agriculture: A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association* 67-76
Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo
- Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT / *Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence* 77-87
Anita Dhewy dan Bella Sandiata

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australian-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Indonesian Feminists' Discourse and Politics

Reformasi politik pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan.

Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.

Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan. Hal ini terlihat pada lahirnya kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik sejak tahun 2002. Di tataran kebijakan sejumlah undang-undang yang pro perempuan sudah disahkan meskipun dalam implementasinya masih kurang dan banyak catatan.

Singkatnya, setelah 20 tahun reformasi gerakan dan pemikiran perempuan terus berkembang. Perkembangan gerakan perempuan tersebut dapat dilihat dari kemunculan berbagai organisasi yang didirikan untuk menyuarakan dan membela kepentingan perempuan dalam berbagai isu, seperti keragaman identitas gender, disabilitas, perempuan adat, perempuan buruh migran, pekerja rumah tangga, dan masih banyak lagi.

Namun, dua puluh tahun sejak reformasi dicetuskan, persoalan mendasar yang telah diperjuangkan sejak

dulu masih dihadapi oleh kaum perempuan. Hingga kini kaum perempuan masih menghadapi persoalan mendasar seperti angka kematian ibu, perkawinan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan upah. Persoalan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender masih terus berlanjut, seperti perkosaan dan pelecehan seksual, juga persekusi terhadap LGBT.

Perjuangan gerakan perempuan belum selesai hanya dengan munculnya berbagai peraturan dan kebijakan yang mengakomodasi ketidakadilan gender. Dalam udara reformasi juga memberikan ruang bagi munculnya konservatisme berbasis agama dan puritanisme yang melakukan kontrol dan pembatasan terhadap perempuan. Negara semakin memfasilitasi kecenderungan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan lewat peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal.

Dalam situasi tersebut, gerakan perempuan terus mencari bentuk dan pemikiran untuk mendorong agenda politik perempuan di ranah publik, mulai dari tingkat nasional hingga di akar rumput. Aksi kolektif perempuan adalah salah satu metode gerakan perempuan yang bertujuan untuk mengajukan tuntutan di ranah publik dengan tetap membawa identitas gender perempuan. Gerakan perempuan pun tak berhenti pada persoalan perempuan, tetapi juga merambah persoalan publik yang lebih luas, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini memperlihatkan upaya pemikiran dan gerakan perempuan untuk berjuang dalam berbagai ranah dan isu. Mulai dari gerakan basis di akar rumput hingga gerakan advokasi di level kebijakan. Mulai dari lingkup kecil di tataran desa hingga skala nasional.

Semua tindakan kolektif yang melibatkan aktor kolektif dan diskursus gender tersebut menegaskan gerakan perempuan punya dampak dan daya dorong bagi perubahan sosial yang penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga komunitas, pemerintah, dan masyarakat secara luas. **(Anita Dhewy)**

Titiek Kartika Hendrastiti (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia)

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan

Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 1-12, 1 tabel, 2 gambar, 15 daftar pustaka

This article analyzes the meaning of the anti-gold mining group oral story from Praikaroku Jangga Village, Central Sumba Regency, East Nusa Tenggara. This documentation is important to record the dynamics of the history of local women's movements in the post-reformation era Indonesia in 1998. This study uses a postcolonial feminist ethnographic approach. The female anti-gold mine forces identify as a subaltern movement, whose struggle goes beyond practicality rejecting the gold mining corporation operations. Their speeches about the movement show that the direction of their resistance leads to food independence and sovereignty from extractive business aggression. To maintain their space of life, the women's forces were only connected by words of experience and knowledge of adat and tradition. Postcolonial feminist ethnography explains the dis/interconnectivity between the interests of the state, political economic power, local-national-global. The construction of this anti-mining women's discourse shows the strength of women as agents in caring for natural resources.

Keywords: Central Sumba women's movement, food sovereignty, postcolonial feminist ethnography, subaltern, women's agency

Artikel ini menganalisis makna tutur komunitas anti tambang emas dari Desa Praikaroku Jangga, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Pendokumentasian ini penting guna mencatat salah satu dinamika sejarah pergerakan perempuan lokal di Indonesia pasca Reformasi 1998. Studi ini menggunakan pendekatan etnografi feminis pascakolonial, yang analisisnya menggunakan pisau feminis pascakolonial. Pasukan perempuan anti tambang emas memiliki identitas sebagai gerakan subaltern, yang perjuangannya melampaui praksis menolak operasi korporasi tambang emas. Tutur mereka tentang gerakan menunjukkan bahwa arah perlawanan mereka menuju pada kemandirian dan kedaulatan pangan dari agresi bisnis ekstraktif. Untuk mempertahankan ruang hidupnya, pasukan perempuan tersebut hanya terhubung oleh tutur pengalaman dan pengetahuan adat dan tradisi. Etnografi feminis pascakolonial menjelaskan dis/interkonektivitas antara kepentingan negara, kekuatan ekonomi politik, lokal nasional global. Konstruksi diskursus perempuan anti tambang ini memperlihatkan kekuatan perempuan sebagai agen dalam merawat sumber daya alam.

Kata kunci: gerakan perempuan Sumba Tengah, kedaulatan pangan, etnografi feminis pascakolonial, subaltern, keagenan perempuan

Anne Lockley¹, Lies Marcoes¹, Kharisma Nugroho¹ & Abby Gina² (¹Migunani, Yogyakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia

Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 13-26, 7 tabel, 1 gambar, 6 daftar pustaka

Women's collective action has been used by women's group in Indonesia since early 20th century. The collective action of women in this study is defined as the formal or informal formation and activity of groups or networks of predominantly women that aim to bring about positive changes in women's lives. Eight case studies of women's collective actions discussed in this study reveal variety of backgrounds, motives and agencies in those collective actions. This variety exist due to the different and specific conditions and needs of each of the women's groups. The object of the study in this research were eight collective actions, namely: Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Parepare branch, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center, and Posko Lestari and Posko Mentari. The data of the research were collected through document review, surveys, and in-depth interviews. This research finds that the involvement of women in collective actions stem from gender inequality that they experience in their daily lives. Through the collective actions the women were empowered to strengthen their access to social services and legal protection. This research also finds there were growing understanding about the concept of gender inequality among the women who involved in the collective actions.

Keywords: women's collective action, empowerment, gender inequality, participation

Aksi kolektif perempuan telah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok di berbagai wilayah di Indonesia sejak awal abad ke-20. Aksi kolektif perempuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pembentukan dan aktivitas formal maupun informal dari kelompok atau jejaring para perempuan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan perempuan. Delapan studi kasus aksi kolektif perempuan yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan keragaman latar belakang, motif dan agen dalam aksi-kolektif. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi dan kebutuhan tiap kelompok perempuan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah delapan aksi kolektif di Balai Sakinah 'Aisyiyah, Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Parepare, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center dan Posko Lestari dan Mentari. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa ketidakadilan gender merupakan faktor yang mendorong keterlibatan para perempuan di dalam aksi kolektif. Melalui aksi kolektif para perempuan dapat memperkuat akses mereka terhadap layanan sosial dan perlindungan hukum. Melalui aksi kolektif juga ditemukan tumbuhnya pemahaman tentang ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan.

Kata kunci: aksi kolektif perempuan, pemberdayaan, ketimpangan gender, keterlibatan

Akhmad Misbakhul Hasan¹, Betta Anugrah¹ & Andi Misbahul Pratiwi² (¹Seknas FITRA, Jakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota

Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 27-42, 2 tabel, 6 grafik, 16 daftar pustaka

Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of 2000 about Gender Mainstreaming is a mechanism to in National Development has impacts on the planning and implementation of public policy in Indonesia. Public policy becomes an important arena for the struggle to realize gender equality and justice. One of the government's commitments to this matter can be seen through Gender-Responsive Budgeting (GRB). This study analyses gender responsive budgeting in social protection programs in Indonesia, with case studies in three regions, namely Gunungkidul Regency, North Lombok Regency, and Padang City. Data collection is carried out by in-depth interviews and literature studies, including the Indonesian Budget and Regional Government Budget documents. This study conducted GRB analysis in three regions with three categories of budget expenditure analysis, namely specifically identified gender-based expenditure, equal employment opportunity expenditure, and mainstream budget expenditure. The results of the study show that in several regions there have been gender-responsive specific budget allocations for affirmation programs for women, children, the elderly, and disability. However, it can be seen that the budget and gender-specific expenditure are still centralized in services that are identical to women's affairs, and not yet mainstreamed in all of the budget allocation.

Keywords: Gender-Responsive Budget, Social Protection Program, Gunungkidul District, North Lombok District, Padang City, Budget Analysis

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik menjadi arena penting bagi perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen pemerintah terhadap hal tersebut salah satunya dapat dilihat melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Penelitian ini menganalisis anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial di Indonesia, dengan studi kasus di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan, termasuk dokumen APBN dan APBD. Penelitian ini melakukan analisis ARG di tiga wilayah tersebut menggunakan tiga kategori analisis belanja anggaran yaitu, specifically identified gender based-expenditure, equal employment opportunity expenditure, dan mainstream budget expenditure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah telah ada alokasi anggaran responsif gender untuk program afirmasi perempuan, anak, orang lanjut usia (lansia) dan difabel. Meski demikian, terlihat bahwa anggaran dan pengeluaran belanja spesifik-gender masih terpusat di dinas-dinas yang identik dengan urusan perempuan dan tidak menjadi arus utama dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial.

Kata kunci: Anggaran Responsif Gender, Program Perlindungan Sosial, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, Kota Padang, Analisis Anggaran Belanja

Aditya Perdana dan Delia Wildianti (PUSKAPOL LP2SP FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia

Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 43-52, 1 tabel, 21 daftar pustaka

This article raises the important question of the achievements of women political movements after 20 years of reformasi in Indonesia. This article intends to elaborate on two main issues, namely the reasons underlying the women's political movement, which has stagnated, and the offer of a strategy that needs to be discussed to attract young women to politics. There are three main issues that are important concerns in the women's political movement after the 1998 Reformation. First, the character of civil society organizations and political parties in Indonesia has its own peculiarities. Second, there is a space of political interaction that has been sufficiently built between political parties and groups of NGOs and women's organizations. Third, in electoral competitions, one of the important issues that still need to be explored further is the effort to win female candidates and regional head candidates so that the number of women's representation can be achieved. Connectivity between millennials and political parties needs to be an important means to be carried out in the near future when parties feel the need for nominating women and their victory must be immediately overcome.

Keywords: gender and politics, elections, women's political representation

Pertanyaan penting yang diajukan artikel ini adalah bagaimana capaian gerakan perempuan politik pasca 20 tahun reformasi di Indonesia? Artikel ini hendak mengelaborasi dua hal utama yaitu alasan yang mendasari gerakan politik perempuan mengalami stagnasi dan menawarkan strategi yang perlu diperbincangkan guna menarik anak muda perempuan untuk berpolitik. Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian penting dalam gerakan politik perempuan pasca Reformasi 1998. Pertama, karakter organisasi masyarakat sipil dan partai politik di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Kedua, ada ruang interaksi politik yang sudah terbangun dengan cukup memadai antara partai politik dengan kelompok LSM dan ormas perempuan. Ketiga, dalam kompetisi elektoral di pemilu, salah satu persoalan penting yang masih perlu didalami lebih lanjut adalah usaha memenangkan caleg perempuan dan calon kepala daerah agar jumlah keterwakilan perempuan dapat tercapai. Konektivitas antara generasi milenial dengan partai politik perlu menjadi sarana yang penting untuk dilakukan dalam waktu dekat manakala partai merasa kebutuhan pencalonan perempuan dan kemenangannya harus segera diatasi.

kata kunci: gender dan politik, pemilu, keterwakilan politik perempuan

Retno Agustin, Indriyati Suparno¹, Samsidar² & Bella Sandiata³ (¹KOMNAS Perempuan, Jakarta, Indonesia; ²Forum Pengada Layanan, Indonesia; ³Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi

Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 53-65, 2 tabel, 5 Grafik, 8 daftar pustaka

The increasing number of violence against women every year raises question about the effectiveness of intergrated service programs for the women victims of violence. The government established the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in 2002 supported by National Commission on Violence against Women (KOMNAS Perempuan) in the effort to provide protection and empowerment of women victims of violence. However, the increasingly diverse forms of violence against women have resulted in complex needs of the victims. The question arises whether the function and performance role of P2TP2A has fully answered the needs of victims or not. This article focuses on assessments conducted by KOMNAS Perempuan and Forum Pengada Layanan (FPL) in 16 provinces to re-examine the role of P2TP2A's functions and performance in meeting the needs of victims. Based on the findings of the assessment, there are still shortcomings in the system and performance of P2TP2A in providing victims' needs, such as lack of awareness as service providers, coordination problems among institutions and limited budget. This assessment uses in-depth interviews and document studies, by including the lessons from the P2TP2A Surakarta city, Bandung district and Central Java Province.

Keywords: P2TP2A, victims, integrated service, violence against women

Angka kekerasan terhadap perempuan yang masih terus meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dari program penanganan bagi perempuan korban kekerasan. Pemerintah telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2002 yang turut didukung Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). P2TP2A didirikan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Namun, bentuk kekerasan yang semakin beragam mengakibatkan kebutuhan perempuan korban semakin kompleks. Artikel ini berfokus pada asesmen yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) di 16 provinsi untuk memeriksa kembali peran fungsi dan kinerja P2TP2A dalam memenuhi kebutuhan korban. Berdasarkan temuan asesmen, masih terdapat kekurangan dari sistem dan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan kepada perempuan korban, seperti kurangnya kesadaran sebagai penyedia layanan, adanya masalah koordinasi antarlembaga, hingga anggaran yang terbatas. Asesmen ini menggunakan metode wawancara mendalam dan studi dokumen, dengan menyertakan pembelajaran dari P2TP2A Kota Surakarta, Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: P2TP2A, perempuan korban, layanan terpadu, kekerasan terhadap perempuan

Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo (Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah

Women's Role in Central Java Agriculture: A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 67-76, 18 daftar pustaka

This research proves the importance of the role of women in the agricultural sector in Central Java through a case study of the Peasants Union Society movement in Qaryah Thayyibah, Salatiga, Central Java. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through literature studies, observations, FGDs and in-depth interviews. The analysis technique uses categorization, interpretation and conclusions from the results of data collection. This research shows that women have a key role in the development of the agricultural sector. Therefore SPPQT's programs for empowering female farmers include: (1) women's political education, (2) involvement of women in the Production Assembly and Peasants' Association, (3) Women's involvement in the Village Development Council (Team 11). The findings

also show obstacles to community resistance for the third point. This can be overcome again by SPPQT's vision, gender equality needs to be seen as a solution to improve the agricultural sector.

Keywords: the role of women, farmer groups, marginalization

Penelitian ini membuktikan pentingnya peran perempuan dalam sektor pertanian di Jawa Tengah lewat studi kasus gerakan Serikat Paguyuban Petani di Qaryah Thayyibah, Salatiga, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, FGD dan wawancara mendalam. Teknik analisis menggunakan kategorisasi, interpretasi dan kesimpulan dari hasil pengumpulan data. Penelitian ini memperlihatkan perempuan mempunyai peran kunci dalam pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu program yang dijalankan SPPQT untuk pemberdayaan perempuan petani meliputi: (1) pendidikan politik perempuan, (2) keterlibatan perempuan dalam Jamaah Produksi dan Paguyuban Tani, (3) Pelibatan perempuan dalam Dewan Pembangunan Desa (Tim 11). Temuan juga memperlihatkan kendala adanya penolakan dari masyarakat untuk poin ketiga. Hal ini dapat diatasi dengan kembali pada visi SPPQT, kesetaraan gender perlu dilihat sebagai solusi untuk meningkatkan sektor pertanian.

Kata kunci: peran perempuan, kelompok tani, marginalisasi

Anita Dhewy & Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT

Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 77-87, 10 daftar pustaka

This article discusses the novelty of the women's movement in encouraging women's political representation and advocating for the elimination of domestic violence. Data is obtained through interviews with actors involved in the women's movement, especially actors from civil society organizations. The results of the study show that the women's movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election becomes a sign of the inclusion of women in the political agenda. While the women's movement in the advocacy for Law on the Abolition of Domestic Violence dismantles private and public dichotomies that are detrimental to women in the context of domestic violence. This study also shows that women's movements need strong concepts, adaptive strategies and synergies with various elements to be able to push the women's agenda and encourage change.

Keywords: women's movement, women's political representation, affirmative action, Law on the Abolition of Domestic Violence

Artikel ini membahas kebaruan yang dihasilkan gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan politik perempuan dan advokasi penghapusan KDRT. Data diperoleh melalui wawancara terhadap para aktor yang terlibat dalam gerakan perempuan, khususnya para aktor dari organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian memperlihatkan gerakan perempuan untuk advokasi kebijakan afirmatif pemilu menjadi penanda masuknya perumusan perempuan dalam agenda perpolitikan. Sementara gerakan perempuan untuk advokasi UU PKDRT membongkar dikotomi privat dan publik yang merugikan perempuan dalam konteks kekerasan di ranah domestik. Kajian ini juga menunjukkan gerakan perempuan membutuhkan konsep yang kuat, strategi yang adaptif dan sinergi dengan berbagai elemen untuk dapat mendesak agenda perempuan dan mendorong perubahan.

Kata kunci: gerakan perempuan, keterwakilan politik perempuan, tindakan afirmatif, UU PKDRT

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia

Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia

Aditya Perdana dan Delia Wildianti

PUSKAPOL LP2SP FISIP Universitas Indonesia
Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI Depok 14624, Indonesia

aditya.perdana@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 7 Januari 2019, direvisi 19 Februari 2019, diputuskan diterima 26 Februari 2019

Abstract

This article raises the important question of the achievements of women political movements after 20 years of reformasi in Indonesia. This article intends to elaborate on two main issues, namely the reasons underlying the women's political movement, which has stagnated, and the offer of a strategy that needs to be discussed to attract young women to politics. There are three main issues that are important concerns in the women's political movement after the 1998 Reformation. First, the character of civil society organizations and political parties in Indonesia has its own peculiarities. Second, there is a space of political interaction that has been sufficiently built between political parties and groups of NGOs and women's organizations. Third, in electoral competitions, one of the important issues that still need to be explored further is the effort to win female candidates and regional head candidates so that the number of women's representation can be achieved. Connectivity between millennials and political parties needs to be an important means to be carried out in the near future when parties feel the need for nominating women and their victory must be immediately overcome.

Keywords: gender and politics, elections, women's political representation

Abstrak

Pertanyaan penting yang diajukan artikel ini adalah bagaimana capaian gerakan perempuan politik pasca 20 tahun reformasi di Indonesia? Artikel ini hendak mengelaborasi dua hal utama yaitu alasan yang mendasari gerakan politik perempuan mengalami stagnasi dan menawarkan strategi yang perlu diperbincangkan guna menarik anak muda perempuan untuk berpolitik. Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian penting dalam gerakan politik perempuan pasca Reformasi 1998. *Pertama*, karakter organisasi masyarakat sipil dan partai politik di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. *Kedua*, ada ruang interaksi politik yang sudah terbangun dengan cukup memadai antara partai politik dengan kelompok LSM dan ormas perempuan. *Ketiga*, dalam kompetisi elektoral di pemilu, salah satu persoalan penting yang masih perlu didalami lebih lanjut adalah usaha memenangkan caleg perempuan dan calon kepala daerah agar jumlah keterwakilan perempuan dapat tercapai. Konektivitas antara generasi milenial dengan partai politik perlu menjadi sarana yang penting untuk dilakukan dalam waktu dekat manakala partai merasa kebutuhan pencalonan perempuan dan kemenangannya harus segera diatasi.

kata kunci: gender dan politik, pemilu, keterwakilan politik perempuan

Pendahuluan

Dua puluh tahun reformasi memberikan banyak perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan serta kelembagaan politik dan juga perkembangan gerakan sosial kemasyarakatan di Indonesia, termasuk gerakan perempuan. Sebelum reformasi, isu-isu penting yang terkait dengan gender tidaklah begitu masif di bicarakan. Adapun isu utama di era Orde Baru adalah isu pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi kelompok perempuan di kalangan akar rumput. Pada era ini, pembicaraan politik formal dan pergantian kekuasaan merupakan hal terlarang dan tidak layak dibicarakan kecuali para aktor yang membicarakannya siap untuk menanggung risiko fatal dari rezim Soeharto. Setelah Orde Baru runtuh, isu politik formal dan perbaikan

kelembagaan politik menjadi perbincangan serius di kalangan aktivis masyarakat sipil seperti misalnya revisi undang-undang pemilu dan partai politik. Dalam periode 2000-2002, manakala amendemen UUD 1945 tengah dilakukan, hal yang dibahas adalah perubahan pemilu dan gagasan tindakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan di DPR RI.

Kurun waktu 1999-2004 adalah satu momentum kritis dan penting bagi perubahan kelembagaan politik di Indonesia, termasuk isu keterwakilan perempuan. Masa ini ditandai oleh kegairahan dan antusiasme kelompok masyarakat sipil di berbagai sektor untuk berlomba-lomba dalam memengaruhi proses pembentukan undang-undang baru ataupun revisi terhadap UU yang lama. Bahkan di akhir 1998, para aktivis LSM perempuan

dari berbagai sektor isu yang mereka geluti menyepakati pembentukan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). KPI ini yang menjadi salah satu ujung tombak dalam berinteraksi dengan anggota DPR dan pemerintah untuk meloloskan pelbagai kebijakan yang progender. Sementara itu, para politisi DPR dan juga militer terlihat gagap menanggapi keterbukaan politik tersebut. Publik dan media pun selalu menunggu isu dan perdebatan politik seperti yang dihadirkan dalam ruang-ruang perbincangan politik pada masa itu. Isu keterwakilan perempuan pun menjadi salah satu hal yang baru dibicarakan pada tahun 2002. Kala itu, salah satu keputusan MPR RI adalah mendesak adanya akomodasi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam berbagai lembaga politik yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam pembahasan revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik di tahun yang sama, isu keterwakilan perempuan masuk dalam pembahasan.

Setelah kuota keterwakilan perempuan berhasil disematkan dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik serta diimplementasikan oleh partai politik dalam setiap pemilu sesudahnya (2004 hingga kini), lalu apa yang terjadi? Hasil Pemilu 2014, misalnya, masih belum mampu menghadirkan 30 persen perempuan di dalam setiap level lembaga perwakilan (DPR, DPRD dan DPD). Belum banyak perempuan yang mampu terpilih menjadi kepala daerah, baik di level provinsi ataupun kabupaten/kota. Tidak banyak pula perempuan-perempuan yang mampu memegang pucuk pimpinan tertinggi dari partai politik di Indonesia. Meskipun demikian, gerakan perempuan telah berhasil mendorong banyak perubahan undang-undang dan menginisiasi kebijakan baru yang lebih berpihak kepada perempuan, seperti UU PKDRT, UU Kewarganegaraan, ataupun peraturan pemerintah yang lebih memiliki perspektif gender.

Jadi, bagaimana capaian gerakan perempuan politik pasca 20 tahun reformasi? Selanjutnya, bagaimana strategi untuk mencapai keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen tersebut di masa yang akan datang? Ada begitu banyak perubahan politik dan sosial yang telah terjadi yang disebabkan oleh salah satunya peran gerakan perempuan yang sangat aktif dalam memengaruhi ranah politik formal. Sayangnya, salah satu tujuan utamanya yakni mendorong kehadiran keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen di lembaga DPR ataupun lembaga politik formal lainnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi perjuangan gerakan perempuan. Kehadiran perempuan sebagai calon anggota legislatif memang telah memenuhi syarat 30 persen, namun masalah utamanya adalah keterpilihan mereka yang masih jauh di bawah angka tersebut.

Ada sebagian pihak berpendapat bahwa salah satu masalah berat yang masih dihadapi oleh gerakan perempuan politik adalah persoalan kultural di masyarakat yakni peran serta perempuan di lembaga politik formal belum sepenuhnya dapat diterima. Pihak lain juga merasa bahwa para laki-laki di partai politik tidak memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk dapat berkompetisi bebas dalam pemilu. Keterbatasan dana dan akses jejaring dari perempuan adalah dua hal yang biasanya dihadapi oleh perempuan dalam memenangi kompetisi pemilu. Dalam persoalan isu inilah para aktivis gerakan politik perempuan di luar dan di dalam partai politik merasa perlu ada gagasan ataupun strategi yang tepat untuk mendukung perempuan yang ingin berkompetisi dalam pemilu.

Meskipun gerakan politik perempuan mengalami situasi yang stagnan dan tidak mengalami satu pergerakan yang progresif untuk mencapai tujuannya, namun ada pertumbuhan kesadaran yang positif di kelompok generasi muda dalam minat mereka berpolitik. Artikel ini akan mengelaborasi dua hal utama yaitu alasan yang mendasari gerakan politik perempuan mengalami stagnasi dan menawarkan strategi yang perlu diperbincangkan guna menarik anak muda perempuan untuk berpolitik. Kontribusi artikel ini tentu menjadi sangat penting bagi refleksi gerakan politik perempuan untuk melihat kembali masa depan dan perbaikan bagi perempuan di ranah politik formal.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, artikel ini menggunakan metode pelacakan proses (*process tracing*) (Collier 2011) dalam rangka mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang capaian dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan perempuan politik dalam kurun waktu 20 tahun ini. Di samping itu, artikel ini juga berusaha menemukan kepingan-kepingan dari berbagai kepustakaan dan observasi yang dilakukan oleh penulis dengan interaksi yang intensif dengan para aktivis gerakan dan politisi perempuan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Artikel ini juga mencari jawaban tersebut dengan melihat berbagai aspek sebab akibat yang perlu diperhatikan dalam rentetan peristiwa politik dan pemilu yang melibatkan aktor-aktor perempuan.

Artikel ini terdiri dari lima bagian yaitu pertama, pendahuluan yang mengelaborasi tentang capaian gerakan perempuan politik pascareformasi yang menjadi penting diperhatikan dalam studi perempuan dan politik di Indonesia saat ini. Bagian kedua lebih banyak membicarakan periode penting dalam interaksi

perempuan di arena politik pascareformasi berdasarkan studi-studi terdahulu. Bagian ketiga memfokuskan diri dalam hambatan dan tantangan yang dihadapi gerakan sehingga hasil yang diinginkan masih jauh dari harapan. Bagian keempat menawarkan strategi baru yang perlu diperhatikan oleh para aktivis gerakan perempuan politik bahwa sudah saatnya mempertimbangkan kelompok perempuan muda milenial sebagai agen penting dalam gerakan ini. Terakhir, artikel ini ditutup dengan kesimpulan yang dapat dijadikan masukan bagi banyak pihak dalam meneruskan gerakan keterwakilan perempuan.

Perempuan dan Politik Pascareformasi

Kami membagi tiga periode penting dalam mendeskripsikan gerakan perempuan di politik formal yaitu periode 1999-2004, periode 2004-2009, dan terakhir periode 2009 hingga kini. Studi yang membahas perempuan dan politik pascareformasi di Indonesia sudah cukup banyak dan memadai. Dalam narasi yang menceritakan keaktifan gerakan perempuan di akhir masa Orde Baru, Robinson (2009) menceritakan bagaimana Suara Ibu Peduli (SIP) membawa tuntutan kepada pemerintah tentang mahalnya harga susu dan barang kebutuhan pokok sehari-hari yang berdampak terhadap keluarga mereka. Di samping itu, kehadiran KPI sebagai wadah organisasi perempuan dari lintas sektoral dan isu juga dibahas oleh Robinson. Selain itu, sebuah referensi yang signifikan dalam mendorong argumen keterwakilan perempuan di pembahasan UU Pemilu dan UU Partai Politik di tahun 2002-2003 adalah hasil konferensi internasional yang digagas oleh CETRO dan IDEA (Soetjipto 2002). Buku ini sebenarnya menjadi amunisi yang cukup memadai bagi para aktivis perempuan untuk menyatakan pandangan yang komprehensif tentang perlunya kuota perempuan di parlemen.

Selain itu, berbagai studi yang merekam dan menceritakan secara detail tentang pembahasan kuota gender dalam pembahasan UU Pemilu dan Partai Politik dilakukan secara baik dan sistematis oleh Ani Soetjipto (2004) dan Wahidah Siregar (2008). Dalam kurun waktu 1999-2004, sebagian besar para ilmuwan politik yang merekam bagaimana aktivitas perempuan dalam kancah perpolitikan nasional menganggap bahwa ruang keterbukaan tersebut dapat dimanfaatkan secara baik meskipun tantangan untuk memengaruhi kelompok status quo Orde Baru dan para laki-laki yang kurang reformis berat dilakukan.

Namun demikian, satu perkembangan yang melegakan adalah terbitnya Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Hal ini dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada masa ini, salah satu kunci keberhasilan advokasi gerakan politik perempuan adalah diakomodasinya pasal mengenai imbauan keterwakilan perempuan dalam daftar nama calon anggota legislatif sebanyak 30 persen dalam pemilu legislatif 2004. Sejak saat itu ruang-ruang advokasi isu-isu perempuan juga terbuka dan pengorganisasian perempuan dapat dilakukan dengan leluasa.

Sementara itu, dalam periode 2004-2009, kajian yang relevan dan juga memotret perjuangan kelompok perempuan dalam perubahan kebijakan tentang kuota gender dibahas oleh Sri Budi Eko Wardani (2009), Ani Soetjipto (2011; 2012), dan juga tim Puskapol UI (2007; 2010). Dalam periode ini, salah satu isu yang menonjol dibahas adalah penyajian fakta dan data bahwa rendahnya keterwakilan perempuan yang diperoleh dari Pemilu 2004 dan 1999 lebih disebabkan oleh masih lemahnya dukungan elite partai politik dalam menempatkan perempuan di nomor urut yang strategis. Oleh karena itu, tawaran kebijakan yang dibawa oleh gerakan perempuan dan politik tersebut adalah bagaimana menempatkan perempuan dalam posisi yang aman dan memiliki peluang yang besar untuk dapat terpilih sebagai anggota dewan. Untuk itu pilihan zipper atau nomor urut secara silang bergantian (1:3) adalah opsi yang selalu digaungkan sebagai bahan advokasi kelompok ini. Faktanya dalam perdebatan di tahun 2008, para politisi DPR menyetujui dua hal penting terkait kuota gender ini: *pertama*, partai politik tidak lagi diimbau melainkan bersifat wajib dalam menempatkan jumlah 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif (caleg) di setiap dapil dan di semua tingkatan pemilu (nasional, provinsi dan kabupaten/kota). *Kedua*, oleh karena keterpilihan perempuan rendah dalam pemilu sebelumnya, para politisi di DPR menyetujui adanya mekanisme zipper yang dimaksud agar memudahkan keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu ini. Sayangnya, seperti yang disampaikan oleh Wardani (2009), konsep zipper yang memungkinkan keterpilihan perempuan dapat memenangkan kursi lebih banyak telah digagalkan oleh hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK tersebut cukup mengejutkan gerakan perempuan karena dengan sistem proporsional daftar tertutup yang ditetapkan oleh DPR

dan memudahkan bagi mereka dalam membangun strategi yang efektif telah diubah dengan sistem daftar terbuka. Sistem ini tidak lagi memperhatikan nomor urut, namun berlaku suara terbanyak bagi setiap caleg di setiap dapil. Dalam era ini, ada sebuah kontradiksi. Di satu sisi, desain perjuangan yang telah diarahkan dengan sangat baik oleh para aktivis perempuan di partai politik dan LSM berhasil diadopsi dalam UU Pemilu. Namun di sisi lain, ada celah berupa keputusan MK yang justru membuyarkan strategi yang sudah dirancang secara rapi oleh caleg perempuan untuk memudahkan kemenangan mereka dalam Pemilu 2009.

Periode ketiga, 2009-2018, menunjukkan bahwa implementasi keterwakilan perempuan menghadapi dilema yang beragam berdasarkan studi-studi yang berkembang. Paling tidak kami membaginya menjadi dua kelompok studi dalam periode ini. *Pertama*, studi yang membicarakan keterbatasan struktural dan hambatan kultural yang dihadapi oleh para caleg perempuan di Indonesia dalam mewujudkan afirmasi tersebut (Hillman 2018; Perdana 2014). Dalam studi kategori ini, penekanannya adalah bagaimana pengalaman para caleg dan juga respons yang mereka hadapi dalam kompetisi pemilu legislatif yang penuh tantangan tersebut. Pembahasan yang relatif sama dan tantangan yang tidak banyak perubahan juga terjadi dalam arena Pilkada (Dewi 2015; 2018). Bahkan Dewi (2015) menegaskan sebuah kesimpulan penting bahwa para kepala daerah perempuan di tanah Jawa merupakan perempuan yang punya kekuatan dan pengaruh signifikan kepada pemilih karena adanya dukungan keluarganya yang jelas membantu kemenangannya. *Kedua*, studi yang melihat interaksi intensif antara gerakan politik yang dilakukan oleh aktivis perempuan dari kelompok LSM dan partai politik (Perdana 2017). Perdana memperlihatkan bahwa ada masalah serius yang dihadapi oleh gerakan politik perempuan belakangan ini sehingga hasil pemilu yang diharapkan tidaklah memuaskan. Interaksi dan relasi yang terbangun antara kelompok LSM dan partai politik sebenarnya berjalan relatif baik. Sayangnya, oleh karena karakter LSM dan partai politik di Indonesia juga kebutuhan dan kepentingan keduanya yang berbeda, hal ini membuat dukungan masyarakat sipil kepada para aktivis perempuan di partai atau bahkan sebaliknya tidaklah maksimal dilakukan dalam menyukseskan advokasi keterwakilan perempuan. Studi dalam kategori ini sebenarnya sudah mulai bergeser tidak selalu melihat perdebatan serius dan masalah yang terus berkejolak dalam pencalonan dan keterpilihan para perempuan di setiap pemilu. Hal yang patut dicermati adalah bagaimana para caleg perempuan tersebut dapat berhasil atau tidak

berhasil dalam kontestasi pemilu dan bagaimana peran para perempuan yang ada di DPR mampu mendorong agenda progender dalam pembahasan UU dan kebijakan.

Hambatan dan Tantangan Gerakan Perempuan Politik Pascareformasi

Kajian yang merekam peristiwa gerakan politik perempuanselamakurun20tahunterakhirinimenegaskan bahwa kesadaran perempuan dalam berpolitik sudah terbangun dengan baik. Namun demikian, tidak mudah mewujudkan impian keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen manakala masih ada begitu banyak kendala dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan itu sendiri. Gerakan perempuan dalam hal memperjuangkan keterwakilan perempuan dibandingkan dengan gerakan lain yang juga memiliki tujuan politik yang jelas seperti kelompok lingkungan hidup ataupun hak asasi manusia, ada banyak catatan menarik yang dapat dilihat. Misalnya, gerakan perempuan terlihat jauh lebih solid dalam elaborasi isu karena menyangkut kesamaan identitas gender yang memudahkan gerak langkah mereka dalam menyusun strategi advokasi dan aksi. Meskipun pilihan politik para aktivis perempuan berbeda, namun terlihat sekali adanya kesamaan pandangan dalam menyatakan argumen dan pendapat tentang perempuan, anak ataupun keluarga. Sementara itu, dari sisi kelompok oposisi pun tampaknya tidak banyak aktor yang merasa harus berseberangan dengan kelompok perempuan karena relatif kepentingan politik para aktor tersebut pun rendah. Isu gender masih sepenuhnya dianggap oleh para elite politik lelaki sebagai isu dan masalah bagi perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, mereka merasa tidak perlu memberikan perhatian penuh tentang hal tersebut.

Sebagai sebuah gerakan sosial, kelompok masyarakat sipil dan partai politik yang bekerja bersama-sama dalam mendorong keterwakilan perempuan juga mengalami tekanan dari lingkungan tempat mereka berinteraksi. Kelompok masyarakat sipil di Indonesia memiliki kekhasan dalam bentuknya yang terfragmentasi dan bekerja dalam isu dan sektor yang beragam serta kemampuan memengaruhi kebijakan yang cukup mumpuni (Perdana 2015). Oleh karena karakter kelompok masyarakat sipil yang cenderung terfragmentasi tersebut, gerakan perempuan pun menghadapi persoalan yang relatif sama yaitu beragamnya jenis kelompok dan ruang gerakan kelompok perempuan dalam ranah sosial dan pembangunan. Hal ini memang diakibatkan oleh keberlanjutan sejarah yang terjadi pada masa Orde Baru. Banyak kelompok masyarakat sipil,

termasuk kelompok perempuan, bekerja dalam sektor pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan komunitas dan pelayanan kepada kelompok rentan. Dalam isu-isu inilah sebenarnya perdebatan dan diskusi soal politik tidaklah mengganggu rezim yang berkuasa. Sementara pemerintah pun merasa nyaman bekerja sama untuk membantu dalam menuntaskan program-program mereka.

Interaksi mereka dengan pemerintah pun tidaklah mudah (Perdana 2017). Pada masa Orde Baru, sebagian besar kelompok masyarakat sipil lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan oposisional dalam berhadapan dengan negara, namun bersikap kooperatif dan bersedia untuk bekerja sama. Kalaupun ada yang berbeda pandangan dengan negara, kelompok ini pun sangat memahami risiko yang dihadapinya. Oleh karenanya, pada awal Reformasi, kelompok masyarakat sipil yang bekerja dalam isu reformasi kelembagaan politik ataupun HAM tidaklah mudah mengajak kelompok lain dalam bersinergi dan mendorong perubahan. Resistensi ataupun ketakutan pada masa Orde Baru masih menghantui interaksi dengan negara. Pada saat yang sama, sebagian kelompok masyarakat sipil pun merasa tidak sepenuhnya percaya bahwa negara dapat mengakomodasi semua aspirasi mereka. Namun dalam interaksi antara kelompok masyarakat sipil perempuan dan pemerintah dalam reformasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya pada saat ini sudah banyak berubah. Pemerintah pun sudah lebih terbuka dalam menerima masukan dan komentar apapun dari kelompok masyarakat sipil. Politisi di DPR dan DPRD juga mudah untuk merespons tuntutan publik. Kelompok masyarakat sipil pun sudah tidak canggung lagi dalam melakukan lobi-lobi politik kepada lembaga legislatif ataupun eksekutif. Bahkan para aktor LSM perempuan ini pun mampu berdebat dan beda argumen dalam hal-hal yang bersifat teknis dan substantif dengan pihak pemerintah dan DPR (Perdana 2017). Akibatnya beberapa contoh undang-undang yang lebih progender mudah didiskusikan dan disahkan oleh DPR seperti UU Perlindungan Pekerja Migran, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, UU Kewarganegaraan, dan sebagainya.

Meski demikian, gerakan perempuan masih dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam mendorong agenda kebijakan responsif gender di parlemen. Seperti misalnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan

RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang tidak menjadi prioritas Prolegnas 2018 padahal ketiganya termasuk RUU yang strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender khususnya merupakan komitmen pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni target 5.1, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dapat dicapai jika terjadi peningkatan kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan (Indikator 5.1.1). Termasuk pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini didorong secara masif oleh gerakan perempuan dan masyarakat sipil tetapi belum dapat diselesaikan oleh wakil rakyat di parlemen. Keseriusan dan komitmen perempuan wakil rakyat di parlemen menjadi kunci tercapainya agenda kebijakan responsif gender di tengah budaya patriarki yang masih melekat dalam pembahasan UU di DPR.

Sementara itu, secara kelembagaan harus diakui bahwa partai politik di Indonesia masih lemah yang ditandai dengan dominasi pimpinan partai dalam setiap keputusan yang diambil. Karakter ini tidak bisa dilepaskan dari dominasi pemerintahan otoriter di era Orde Baru yang membuat partai politik merasa sulit berkembang. Oleh karena itu, pada masa reformasi, kebangkitan peran dan posisi sentral partai politik mendorong perubahan pola interaksi dalam pembuatan kebijakan di lembaga legislatif. Bila pada masa Soeharto, anggota dewan merasa kesulitan berbeda pendapat dengan pemerintah, maka para politisi DPR dan DPRD lebih mudah terbuka dalam menyampaikan pandangan-pandangannya termasuk kritik terhadap pemerintah. Sayangnya, dalam hal pembuatan keputusan penting di lembaga legislatif, para politisi ini masih bergantung terhadap sosok dan peran ketua partainya masing-masing. Di samping itu, persoalan dalam kelembagaan partai yang serius adalah menyangkut pandangan dan posisi politik yang disampaikan di forum-forum formal pembuatan kebijakan. Oleh karena saat ini ada kecenderungan partai politik lebih mengedepankan aspek personalisasi tokoh partai ketimbang program, maka mudah goyahnya pandangan politik partai dalam isu-isu yang dibahas di DPR adalah jawabannya. Dalam konteks inilah sebenarnya sebagian besar partai politik kita tidak memiliki posisi yang mudah dilacak dalam semua pembahasan undang-undang yang ada. Bagi kelompok masyarakat sipil perempuan, karakter partai politik dan para politisinya yang seperti ini bukanlah hal yang mudah dimengerti. Satu sisi dapat menguntungkan bagi agenda advokasi kepentingan gender manakala para pemimpin partainya tidak sepenuhnya memahami

perdebatan yang ada sehingga semua masukan dari masyarakat sipil dapat dipenuhi. Contoh yang relevan ada dalam pembahasan UU Penghapusan KDRT. Namun di sisi lain, apabila ada hal-hal yang menyangkut dan terkait dengan kepentingan elektoral partai ataupun para politisi, maka isu-isu gender menjadi sangat rumit dan sulit dicari kesepakatannya seperti isu zipper dalam pencalonan perempuan di dapil. Artinya kelompok partai politik, termasuk para politisi perempuan, memiliki karakter yang berbeda dengan kelompok masyarakat sipil. Para politisi tentu harus mempertimbangan kepentingan partai dan konstituennya dalam bersikap. Sementara para aktivis LSM tidak perlu memperhatikan isu elektoral, namun hanya kepentingan publik ataupun komunitas.

Isu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga memiliki persoalan yang tidak kalah pelik. Salah satunya tentu adalah pencalonan dan juga kemenangan caleg perempuan. Dalam interaksi kami dengan para caleg perempuan dalam menghadapi Pemilu 2019 yang akan datang, isu utamanya adalah soal bagaimana memastikan mereka sebagai caleg perempuan dapat memenangkan kursi. Penempatan 30 persen kuota di setiap dapil dan setiap partai sudah bukan isu serius karena semua partai mampu melakukan hal tersebut. Persoalan yang serius saat ini adalah bagaimana memenangkan caleg perempuan dalam sebuah kompetisi pemilu yang ketat. Tergambar dalam tabel berikut bagaimana perempuan yang dicalonkan tiap partai sudah melebihi 30 persen, namun tingkat keterpilihannya dari sejak tahun 2004 hingga 2014 lalu belum pernah mencapai minimal 30 persen tersebut.

Tabel 1 Persentase Kandidat Perempuan dan Perempuan terpilih dalam Pemilu 2004-2019

Partai Politik	Pemilu							
	2004		2009		2014		2019	
	Kandiat Perempuan	Perempuan terpilih	Kandiat Perempuan	Perempuan terpilih	Kandiat Perempuan	Perempuan terpilih	Kandiat Perempuan	
PDIP	28,3%	12 (11%)	222 (35,41%)	17 (18%)	200 (35,71%)	21(19,3%)	215 (37,39%)	
Golkar	28,3%	18 (14%)	194 (30,27%)	18 (18%)	202 (36,07%)	16 (17,6%)	218 (37,91%)	
Gerindra	-	-	116 (29,29%)	4 (19%)	203 (35,45%)	11 (15%)	213 (37,04%)	
Demokrat	27%	6 (10,52%)	221 (32,94%)	35 (24%)	205 (36,61%)	13 (21,3%)	228 (39,72%)	
PAN	35%	7 (13,46%)	177 (29,70%)	7 (15%)	207 (36,96%)	9 (18,4%)	218 (37,91%)	
PKB	37,6%	7 (13,46%)	134 (33,67%)	7 (25%)	210 (37,63%)	10 (21,3%)	220 (38,26%)	
PKS	40,3%	3 (6,6%)	212 (36,61%)	5 (13%)	191 (38,82%)	1 (2,5%)	212 (39,41%)	
PPP	22,3%	3 (5,17%)	127 (26,91%)	5 (13%)	214 (39,05%)	10 (25,6%)	230 (41,29%)	
Nasdem	-	-	-	-	226 (40,43%)	4 (11,4%)	220 (38,26%)	
Hanura	-	-	186 (30,67%)	4 (22%)	203 (36,38%)	2 (12,5%)	233 (41,68%)	

Sumber: data diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum

Dari hasil kajian bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), caleg perempuan yang tidak memiliki kekuatan jaringan dan dukungan finansial yang memadai akan sulit memenangkan kursi. Sementara pesaing mereka adalah para kompetitor lelaki yang juga kuat secara finansial dan jejaring sosial dan politik. Oleh karena itu, para aktivis perempuan yang memiliki kelemahan tersebut dapat dipastikan tidak mudah memenangkan setiap kompetisi pemilu. Untuk itu mudah dipahami pula apabila pemilu 2014 dan 2009 yang lalu, sebagian dari para anggota DPR perempuan terpilih berasal dari kategori calon yang memiliki rekam jejak dengan dinasti dan keluarga politik ataupun tokoh yang populer dan memiliki dana yang besar.

Begitu pun hambatan struktural dalam eksekutif, di Pilkada 2018, hanya ada 31 perempuan dari total 342 orang yang terpilih jadi kepala dan wakil kepala daerah (9,06 persen). Angka ini cenderung stagnan jika dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Di Pilkada 2017, hanya 5,90 persen perempuan yang menang sementara di Pilkada 2015, hanya ada 8,7 persen perempuan yang menang. Data ini menegaskan ketimpangan partisipasi perempuan di Pilkada serentak yang digelar dalam tiga gelombang pada 2015, 2017, dan 2018. Rekapitulasi hasil Pilkada tiga gelombang itu hanya melahirkan total 92 perempuan kepala dan wakil kepala daerah (8,49 persen). Mereka tersebar di 91 daerah (4 provinsi, 69 kabupaten, dan 18 kota) dari 542 daerah yang menggelar pilkada. Khusus Pilkada 2018, latar belakang 31 perempuan yang terpilih didominasi oleh mereka yang mempunyai jaringan kekerabatan (17 dari 31 atau 54,84 persen), kader partai (15 dari 31 atau 48,39 persen), eks dan anggota legislator (13 dari 31 atau 41,94 persen), serta petahana (9 dari 31 atau 29,03 persen). Empat hal ini konsisten mendominasi latar belakang perempuan kepala dan wakil kepala daerah terpilih dari pilkada ke pilkada. Hal ini menunjukkan sempitnya basis rekrutmen partai politik. Partai tidak melakukan program serius dalam membina kader perempuan secara memadai. Kecenderungan ini terjadi karena partai tak punya mekanisme perekrutan anggota yang inklusif dan terbuka. Akhirnya, partai hanya menempatkan perempuan dengan elektabilitas tinggi.

Dari uraian masalah di atas, paling tidak ada tiga hal utama yang menjadi perhatian penting dalam gerakan politik perempuan pasca Reformasi 1998. *Pertama*, karakter organisasi masyarakat sipil dan partai politik di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Kelompok-kelompok LSM perempuan cenderung terfragmentasi

dalam berbagai sektor dan isu yang mereka geluti. Meskipun ada KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) yang mewadahi kelompok para aktivis perempuan, hal ini tidaklah serta-merta mengubah karakter gerakan dan arah dari kelompok perempuan tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam ranah partai politik. Kelompok perempuan di partai politik pun berada dalam ruang yang sama yaitu Kaukus Perempuan Partai Politik Indonesia (KPPPI) ataupun Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) yang terdiri dari beragam partai politik. *Kedua*, ada ruang interaksi politik yang sudah terbangun dengan cukup memadai antara partai politik dengan kelompok LSM dan ormas perempuan. Ada anggota DPR perempuan yang berasal dari kelompok LSM dan terus meminta dukungan terhadap gerak dan aktivitasnya di DPR. Ada pula gerakan perempuan yang terus memberikan masukan dan komentar terhadap kebijakan pengarusutamaan gender pemerintah. Untuk itu, komunikasi dan pertukaran informasi antara para aktor dapat mudah terjadi. *Ketiga*, dalam kompetisi elektoral di pemilu, salah satu persoalan penting yang masih perlu didalami lebih lanjut adalah usaha memenangkan caleg perempuan dan calon kepala daerah agar jumlah keterwakilan perempuan dapat tercapai dan juga kehadiran perempuan di DPR dan eksekutif dapat jauh lebih bermakna bagi seluruh masyarakat.

Membangun Koneksi Politik Generasi Milenial

Perdana (2017) dalam disertasinya menyatakan bahwa memperjelas bangunan konektivitas antara kelompok masyarakat sipil perempuan dengan partai politik perlu dilakukan secara serius dan sistematis. Kenapa hal ini penting dan menarik diperhatikan? Terdapat beberapa argumen mendasar yaitu: pertama, seperti yang telah disinggung di atas bahwa kemenangan perempuan dalam pemilu sangat ditentukan oleh jejaring politik dan sosial yang dimiliki oleh kandidat. Meskipun harus diakui bahwa jejaring yang dimaksud tentu juga merupakan persoalan serius bagi caleg lelaki, namun caleg perempuan masih belum mampu memaksimalkan potensinya dalam berjejaring. Hal ini kami temukan dalam berbagai pelatihan yang kami laksanakan bahwa caleg perempuan masih kesulitan menentukan potensi dukungan yang bisa diperoleh di setiap kelompok masyarakat di dapilnya dan cara mendekati kelompok tersebut. Meskipun para caleg perempuan ini mampu dengan baik mengidentifikasi kelompok dukungan mereka. *Kedua*, oleh karena sebagian besar organisasi massa dan LSM menyatakan sikap politik yang nonpartisan dalam kontestasi pemilu, maka dukungan politik terhadap caleg pun sebenarnya tidaklah mudah

didapat. Meski sebenarnya para pemilih masih tetap mengandalkan pilihannya di bilik suara kepada para tokoh di ormas atau kelompok masyarakat yang mereka ikuti. Artinya ikatan sosial antara organisasi massa dengan pemilih sebenarnya cukup kuat dan mampu menjadi pendorong dalam kontestasi para caleg di setiap pemilu, namun sayangnya belum dimaksimalkan manakala sikap dan posisi nonpartisan menjadi satu isu tersendiri. Hal yang biasanya terjadi adalah partai politik hanya melakukan klaim dukungan tetapi pada dasarnya sulit membuktikan seberapa besar jumlah pendukungnya secara riil karena persoalan isu nonpartisan tadi.

Jika demikian apa maknanya bagi para caleg perempuan? Untuk menghasilkan target jumlah keterwakilan perempuan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, maka perlu ada bangunan strategis yang harus dilakukan oleh setiap partai politik. Partai politik dapat melakukan proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang harus berpihak terhadap keterwakilan perempuan. Seperti dalam Pemilu di India pada 2009, komitmen dua partai politik besar Partai Kongres dan Partai Bharatiya Janata terlihat jelas dalam keberpihakan dan dorongan terhadap calon perempuan hingga mampu memperoleh kursi-kursi tersebut untuk perempuan (Spary 2014). Namun demikian, Verge dan de la Fuente (2014) juga mengingatkan bahwa pemenuhan kuota perempuan tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara formal melalui partai politik manakala masih ada tantangan dan hambatan di dalamnya. Salah satu yang strategis tentu dengan jalur informal yang memudahkan kuota tersebut dapat dilakukan.

Oleh karena itu, isu pencalonan perempuan di setiap pemilu semestinya bukanlah menjadi masalah besar yang selalu terulang dan menjadi keluhan para elite lelaki di setiap partai manakala strategi kaderisasi dan rekrutmen tersebut dilakukan secara baik. Untuk mengisi dan menempatkan para perempuan di setiap dapil bukan persoalan serius manakala partai pun sepenuhnya percaya bahwa setiap anggota dan pengurusnya di dapil mampu memenangkan dan memaksimalkan dukungan pemilih di dapil bukan caleg yang diimpor dari daerah lain. Apalagi menghadapi pemilu 2019 dan seterusnya tentu partai politik sudah harus memikirkan regenerasi dan pola kepemimpinan yang baru dengan memberi kesempatan yang luas bagi generasi milenial.

Generasi milenial saat ini sebenarnya memiliki antusiasme politik yang cukup memadai. Hal ini bisa dipahami dalam perbincangan dan aksi riil mereka di berbagai platform media sosial yang ada. Namun sayangnya sikap dan posisi mereka pasif. Mereka

mengikuti dan memahami berbagai peristiwa sosial dan politik yang ada karena seringnya berbagai jenis berita masuk dalam lini masa dan umpan media mereka. Sayangnya, posisi yang pasif tersebut dapat ditunjukkan dari respons mereka yang tidak begitu antusias dalam membicarakan pilihan politik dan keberpihakannya pada calon tertentu manakala para peserta pemilu belum mampu memikat mereka dengan baik. Sementara sebagian dari mereka juga aktif dan berinteraksi dengan berbagai persoalan kemasyarakatan di berbagai organisasi sosial ataupun mahasiswa yang mereka ikuti. Hal inilah yang menjadi potensi serius yang dapat dijadikan pertimbangan bagi partai politik dalam kaderisasi dan perekrutan anggota barunya.

Untuk menjadikan para perempuan muda ini sebagai caleg yang potensial, tentu bukanlah hal yang instan namun dapat dilakukan secara sistematis dalam sebuah proses kaderisasi di partai politik. Langkah yang pertama, tentu partai politik dapat merekrut calon kader atau anggota mereka melalui banyak metode rekrutmen, baik terbuka ataupun tertutup. Namun yang menarik adalah memastikan para calon ini punya pengalaman berorganisasi yang sudah cukup matang dalam berinteraksi dengan orang lain ataupun perencanaan kegiatan. Saat ini, berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa tentu memiliki jejaring dengan partai politik, meskipun sifatnya secara informal dengan jejaring personal. Oleh karena itu jejaring seperti inilah yang perlu dimaksimalkan sebagai bagian penting dalam perekrutan perempuan muda di setiap partai.

Setelah itu, para calon ini diberikan pelatihan dasar yang biasanya dilakukan oleh setiap partai, maka tentu langkah selanjutnya memberikan kesempatan kepada para politisi perempuan muda ini untuk terjun langsung dan berinteraksi dalam arena politik di dua tempat yaitu eksekutif ataupun legislatif. Di ranah eksekutif, para perempuan muda ini dapat bekerja dalam lingkaran dalam para kepala daerah dengan fungsi mereka sebagai staf ahli atau tenaga partai yang sengaja ditempatkan untuk memudahkan interaksi para kepala daerah dengan pengurus partainya. Sementara itu, di ranah legislatif, para perempuan muda ini dapat berfungsi sebagai tenaga ahli atau staf di anggota dewan, fraksi ataupun komisi. Kenapa mereka harus ditempatkan dalam pekerjaan administrasi dan teknis di lembaga legislatif dan eksekutif? Jawabannya adalah ini bagian dari sebuah persiapan bagi mereka agar dapat memahami tugas yang nyata sebagai kepala daerah ataupun anggota legislatif.

Langkah kedua tentu lebih menantang yaitu ikut terlibat dan masuk sebagai bagian dari tim pemenang

bagi para caleg ataupun kandidat di pilkada. Sebagai bagian tim sukses, tentu para perempuan muda ini akan berinteraksi penuh dengan para pemilih dan tahu bagaimana memenangkan hati para pemilih seperti yang mereka lihat secara nyata bersama para caleg tersebut. Tugasnya tentu tidak hanya merancang kampanye, tetapi mereka juga dapat mendukung tim saksi yang harus disiapkan secara serius dan matang. Pengalaman ini menjadi bagian yang juga penting untuk memahami kompleksitas dalam memenangkan kursi di legislatif dan eksekutif secara nyata.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya apabila para perempuan muda ini dapat diberikan kesempatan untuk bertarung dalam kompetisi pemilu berikutnya, bukan dalam waktu dekat satu atau dua tahun sesudah direkrut. Ini merupakan langkah ketiga yang diperlukan agar mereka mendapat ruang untuk memahami apakah pekerjaan yang digeluti tersebut memang sepenuhnya sesuai dengan hati nurani dan minat mereka. Setelah itu, kami merasa yakin bahwa para caleg perempuan yang bertarung di pemilu nanti akan terlihat lebih siap untuk memenangkan kursi manakala kesiapan jaringan sudah memadai. Oleh karena itu, kami merasa bahwa inilah bentuk pola pengaderan yang sistematis dengan persiapan yang matang untuk menghasilkan para perempuan potensial di setiap partai politik.

Konektivitas antara generasi milenial dengan partai politik perlu menjadi sarana yang penting untuk dilakukan dalam waktu dekat manakala partai merasa kebutuhan pencalonan perempuan dan kemenangannya harus segera diatasi. Usulan ini sebenarnya dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, hal ini menguntungkan bagi partai dalam mempersiapkan keanggotaannya di masa mendatang manakala tren penurunan anggota dan kepengurusan partai semakin menurun. Untuk itu kebutuhan strategis bagi keberlanjutan dan masa depan partai dapat dibicarakan secara serius mulai saat ini, bukan menjelang pemilu. Sisi kedua, hal ini penting bagi perempuan di partai dalam rangka membangun soliditas isu dan kesamaan pandangan di dalam partai. Di titik inilah perempuan di partai politik dapat memperluas kesempatannya untuk mendorong isu-isu pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan partai ataupun fraksi di DPR. Di samping itu perempuan di partai politik dapat memberikan peluang yang luas bagi rekan-rekannya untuk meraih posisi yang lebih tinggi dan strategis di partai. Artinya, isu ini dapat menjadi perantara bagi gerakan politik perempuan di partai untuk secara perlahan dan sistematis mendorong banyak perubahan di internal partai politik.

Penutup

Artikel ini membahas satu fenomena yang menarik dilihat yaitu bagaimana capaian dari gerakan politik perempuan setelah 20 tahun reformasi. Ada begitu banyak perubahan dalam kelembagaan politik setelah reformasi, namun perjuangan inti dari gerakan perempuan tersebut ternyata tidaklah mudah dicapai yaitu 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Hampir sebagian besar aktor dan pelaku gerakan politik perempuan mengakui bahwa persoalan mendasar terletak pada struktural dan kultural yang melingkupi gerakan tersebut. Faktor struktural lebih mengedepankan adanya banyak kendala yang dihadapi oleh para aktivis perempuan di partai politik yang tidak mendapat ruang yang memadai dalam perannya di partai. Salah satunya adalah masih dominannya pimpinan elite laki-laki dalam partai. Sementara itu, faktor kultural mendominasi pemahaman elite laki-laki di partai bahwa ruang perempuan bukanlah di ranah politik formal tersebut.

Namun demikian, artikel ini tidak sepenuhnya membicarakan dua faktor tersebut. Melainkan artikel ini melihat dalam sisi yang berbeda bahwa capaian gerakan politik perempuan sudah baik manakala peraturan perundang-undangan yang memiliki perspektif gender sudah cukup banyak. Artinya kelompok masyarakat sipil perempuan telah mampu mendorong kebijakan progender meskipun jumlah perempuan di parlemen belum memadai. Lebih jauh, artikel ini mengajak pembaca untuk mendalami bahwa capaian jumlah keterwakilan perempuan dapat dilakukan secara sistematis dengan mengajak dan mendorong generasi muda milenial dalam percaturan politik formal. Kenapa hal ini penting untuk diangkat sebagai sebuah isu? Salah satu keluhan dan tantangan dalam menaikkan capaian jumlah tersebut bukan lagi dalam proses pencalonan perempuan, melainkan bagaimana caranya agar para caleg perempuan tersebut mampu memenangkan kursi tersebut. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, kami merasa bahwa harus ada satu desain yang konkret dan sistematis untuk menghubungkan antara gerakan politik perempuan dengan potensial kader partai politik yaitu para aktivis muda perempuan. Dengan berbagai langkah dan strategi yang diterapkan, artikel ini membangun optimisme bahwa pertama, partai politik tentu membutuhkan regenerasi kader dan pengurusnya. Untuk mendapatkan kader perempuan yang berkualitas dan bermutu tentu harus ada perlakuan khusus agar para perempuan ini dapat dipercaya untuk menjadi caleg di pemilu yang akan datang. Kedua, partai politik perlu mempertimbangkan secara serius proses perekrutan

perempuan sejak awal agar mereka dapat mengambil keuntungan elektoral di setiap daerah pemilihan. Dengan demikian, proses pencalonan tidaklah selalu berulang dalam lingkaran setan manakala ada ketidakpercayaan terhadap caleg perempuan untuk dapat memenangkan kompetisi pileg dan perempuan ditempatkan bukan sebagai prioritas dalam nomor urut tersebut. Oleh karena itu, kami percaya bahwa pokok persoalan dalam keterwakilan perempuan adalah bagaimana partai politik memandang secara serius isu ini demi kepentingan perempuan (sebagai caleg dan juga pemilih). Untuk itu, kami juga merasa bahwa sudah saatnya partai politik memandang isu perempuan sebagai salah satu isu penting dalam kelebagaannya, bukan sekadar isu sampingan semata.

Daftar Pustaka

- Collier, D 2011, "Understanding Process Tracing", *Political Science and Politics*, vol. 44, no. 4, hh. 823-830.
- Dewi, KH 2015, *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia*, NUS Press and Kyoto University Press, Singapura.
- Dewi, KH 2018, "Modal, strategi dan jaringan perempuan politisi dalam kandidasi pilkada langsung", *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 15, no. 2, hh. 267-288.
- Hillman, B 2018, "The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia", *Journal of Contemporary Asia*, vol. 48, no. 2, hh. 322-338.
- Institut Kapal Perempuan 2019, *Gerakan Perempuan, 20 Tahun Reformasi*, dilihat 4 Januari 2019, <http://kapalperempuan.org/gerakan-perempuan-20-tahun-reformasi/>
- Koalisi Perempuan Indonesia 2017, "Catatan Perempuan atas Prolegnas: Kejar Target Undang-Undang yang Responsif Gender", Pernyataan Sikap KPI, Jakarta.
- Perdana, A 2014, "Wajah aktivis perempuan dalam parlemen: prestasi dan rekomendasi politik", *Jurnal Perempuan*, vol. 19, no. 2, hh. 73-93.
- Perdana, A 2015, "The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) post Reformation 1998", *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, vol. 20, no. 1, hh. 23-42.
- Perdana, A 2017, *The relationship of civil society organizations (CSOs) and political parties in post-Suharto Indonesia: a women's CSOs perspective*, PhD Dissertation, Universitaet Hamburg.
- Perludem 2018, *Potret Perempuan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2018 (Siaran Pers)*, dilihat 4 Januari 2019, <http://www.perludem.org/2018/08/01/potret-perempuan-kepala-daerah-terpilih-dipilkada-2018/>
- Puskapol UI 2007, *Evaluasi dan rekomendasi tindakan afirmatif untuk peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dalam rangka revisi UU Pemilu*, Puskapol UI, Depok.
- Puskapol UI 2010, *Naskah rekomendasi kebijakan: representasi perempuan dalam regulasi partai politik dan pemilu*, Puskapol FISIP UI, Depok.
- Robinson, K 2009, *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*, Routledge, London and New York.
- Soetjipto, A 2002, *Increasing women's participation through constitutional and electoral reforms*, Conference Report 2002: Strengthening women's political participation in Indonesia, International IDEA, Stockholm, hh. 7-18.
- Soetjipto, A 2004, "Big party politics-still a man's world: A report on Indonesia", dalam B Martin (ed.), *Southeast asian women in politics and decisions-making, ten years after Beijing, gaining ground?: A compilation of five country report*, Friedrich Ebert Stiftung, Manila, hh. 39-69.
- Soetjipto, A 2011, *Politik harapan: perjalanan politik perempuan Indonesia pasca reformasi*, Marjin Kiri, Tangerang.
- Soetjipto, A 2012, "Perempuan dalam politik formal: Perdebatan kajian teori feminis", *Jurnal Perempuan*, vol. 17, no. 4, hh. 21-36.
- Siregar, WZ 2008, *Gaining representation in parliament: A study of the struggle of Indonesian women to increase their numbers in the national, provincial and local parliaments in the 2004 elections*, Australian National University, Canberra.
- Spary, C 2014, "Women candidates and party nomination trends in India: evidence from 2009 general election", *Commonwealth & Comparative Politics*, vol. 52, no.1, hh. 109-138.
- Verge, T & de le Fuente, M 2014, "Playing with different cards: party politics, gender quotas and women's empowerment", *International Political Science Review*, vol.35, no. 67, hh. 67-79.
- Wardani, SBE 2009, "Perjuangan menggagas kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam UU Pemilu tahun 2008", *Jurnal Perempuan*, edisi 63, hh. 41-58.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Dr. Widjajanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. Ro'fah PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Atnike Nova Sigiro (Universitas Paramadina)
6. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
7. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

 **FORDFOUNDATION**

